



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1239/DJU.1/RA1.8/XI/2024

Jakarta, 13 November 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
Pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2024

Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
(daftar terlampir)

Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-446/PB.2/2024 Tanggal 10 November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, dan memperhatikan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan melaksanakan *Self Blocking* dalam rangka Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam ribuan rupiah)

Kementerian/Lembaga/Unit Eselon I	Pagu Total Akun Perjalanan Dinas	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	Target Penghematan
005 MA				
005 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	19.104.995	14.859.212	4.245.783	2.112.891

Untuk itu dimohon kepada Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat pertama (daftar terlampir) agar Segera melaksanakan Revisi *Self Blocking* Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 di luar dari Kegiatan Prioritas Nasional (Pos Bantuan Hukum, Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara, dan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan) pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Setempat sesuai dengan lampiran surat paling lambat **13 November 2024**.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum



Kurnia Arry Soelaksono

**DAFTAR SATUAN KERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
 YANG AKAN MELAKSANAKAN SELF BLOCKING ANGGARAN PERJALANAN DINAS PADA DIPA 03
 NON KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL**

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Anggaran Perjadin Yang akan Di Self Blocking (Rp.)
1	097450	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.563.342.000
Jumlah Total Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum			1.563.342.000
1	099169	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	6.769.000
2	099177	Pengadilan Negeri Takengon	2.923.000
3	099181	Pengadilan Negeri Kuala Simpang	3.581.000
4	099183	Pengadilan Negeri Kutacane	1.005.000
5	099184	Pengadilan Negeri Meulaboh	6.186.000
6	099187	Pengadilan Negeri Tapaktuan	1.608.000
7	099188	Pengadilan Negeri Singkil	1.530.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh			23.602.000
1	099692	Pengadilan Tinggi Ambon	3.000.000
2	099707	Pengadilan Negeri Ambon	8.940.000
3	099711	Pengadilan Negeri Masohi	3.960.000
4	403431	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	1.880.000
5	403433	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	1.500.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon			19.280.000
1	400601	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	2.346.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung			2.346.000
1	099253	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	2.000.000
2	099254	Pengadilan Negeri Banjarmasin	6.120.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin			8.120.000
1	663399	Pengadilan Tinggi Banten	2.710.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten			2.710.000
1	400111	Pengadilan Negeri Bengkulu	3.310.000
2	673042	Pengadilan Negeri Kepahiang	6.185.000
3	673010	Pengadilan Negeri Tais	4.380.000
4	400133	Pengadilan Negeri Manna	1.145.000
5	672995	Pengadilan Negeri Bintuhan	2.051.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu			17.071.000
1	664540	Pengadilan Tinggi Gorontalo	3.014.000
2	099362	Pengadilan Negeri Gorontalo	7.710.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo			10.724.000
1	099220	Pengadilan Negeri Jambi	2.134.000
2	400312	Pengadilan Negeri Bangko	9.500.000
3	477375	Pengadilan Negeri Sarolangun	4.620.000
4	477402	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	5.860.000
5	663013	Pengadilan Negeri Sengeti	2.375.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi			24.489.000
1	400529	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	17.750.000
2	099309	Pengadilan Negeri Balikpapan	1.000.000
3	662987	Pengadilan Negeri Sangatta	5.780.000
4	099287	Pengadilan Negeri Samarinda	1.380.000
5	400292	Pengadilan Negeri Tanjung Redep	2.500.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur			28.410.000
1	099273	Pengadilan Negeri Tarakan	1.462.000
2	477271	Pengadilan Negeri Nunukan	3.475.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara			4.937.000
1	400246	Pengadilan Tinggi Kupang	3.758.000
2	099927	Pengadilan Negeri Kupang	5.191.000
3	099969	Pengadilan Negeri Waingapu	2.100.000
4	099973	Pengadilan Negeri Waikabubak	2.275.000
5	240166	Pengadilan Negeri Oelamasi	11.620.000
6	400008	Pengadilan Negeri Larantuka	2.125.000
7	400014	Pengadilan Negeri Ruteng	1.310.000
8	400164	Pengadilan Negeri Kalabahi	2.000.000
9	477250	Pengadilan Negeri Rote Ndao	1.780.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang			32.159.000
1	099419	Pengadilan Tinggi Makassar	1.293.000
2	099423	Pengadilan Negeri Makassar	16.247.000
3	099533	Pengadilan Negeri Watampone	4.741.000

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Anggaran Perjadin Yang akan Di Self Blocking (Rp.)
4	099582	Pengadilan Negeri Bulukumba	1.350.000
5	099472	Pengadilan Negeri Maros	2.200.000
6	099444	Pengadilan Negeri Pangkajene	1.350.000
7	099451	Pengadilan Negeri Barru	1.800.000
8	099561	Pengadilan Negeri Bantaeng	2.290.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar			31.271.000
1	099732	Pengadilan Negeri Ternate	18.035.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara			18.035.000
1	099313	Pengadilan Tinggi Manado	5.569.000
2	099330	Pengadilan Negeri Manado	2.700.000
3	099334	Pengadilan Negeri Kotamobagu	1.100.000
4	099341	Pengadilan Negeri Tahuna	2.685.000
5	568726	Pengadilan Negeri Bitung	1.800.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado			13.854.000
1	099863	Pengadilan Negeri Mataram	1.470.000
2	099884	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	8.050.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Mataram			9.520.000
1	099189	Pengadilan Tinggi Medan	6.000.000
2	099190	Pengadilan Negeri Medan	10.500.000
3	402013	Pengadilan Negeri Sei Rampah	1.000.000
4	099193	Pengadilan Negeri Sidikalang	1.190.000
5	099199	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	1.260.000
6	099192	Pengadilan Negeri Tanjung Balai	3.670.000
7	099200	Pengadilan Negeri Tarutung	2.310.000
8	099203	Pengadilan Negeri Sibolga	3.500.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan			29.430.000
1	099204	Pengadilan Tinggi Padang	15.155.000
2	099205	Pengadilan Negeri Padang	23.370.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang			38.525.000
1	400359	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	1.523.000
2	099246	Pengadilan Negeri Palangkaraya	3.000.000
3	099250	Pengadilan Negeri Buntok	3.800.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya			8.323.000
1	099226	Pengadilan Negeri Palembang	15.669.000
2	099227	Pengadilan Negeri Kayu Agung	1.720.000
3	099228	Pengadilan Negeri Baturaja	5.675.000
4	099229	Pengadilan Negeri Lubuk Lingau	1.070.000
5	099231	Pengadilan Negeri Lahat	3.000.000
6	099232	Pengadilan Negeri Muara Enim	2.030.000
7	099233	Pengadilan Negeri Sekayu	2.890.000
8	402017	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	2.490.000
9	672953	Pengadilan Negeri Prabumulih	3.175.000
10	672970	Pengadilan Negeri Pagar Alam	10.500.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang			48.219.000
1	400535	Pengadilan Tinggi Palu	23.700.000
2	099376	Pengadilan Negeri Palu	7.081.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palu			30.781.000
1	400076	Pengadilan Negeri Sorong	2.550.000
2	402039	Pengadilan Negeri Kaimana	1.400.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat			3.950.000
1	400251	Pengadilan Tinggi Pontianak	2.000.000
2	099239	Pengadilan Negeri Pontianak	7.590.000
3	099109	Pengadilan Negeri Mempawah	1.500.000
4	670231	Pengadilan Negeri Bengkayang	2.000.000
5	681450	Pengadilan Negeri Ngabang	2.400.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak			15.490.000
1	099133	Pengadilan Negeri Surabaya	2.665.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya			2.665.000
1	477262	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	10.000.000
2	477256	Pengadilan Negeri Pelalawan	1.820.000
3	099216	Pengadilan Negeri Rengat	1.738.000
4	099217	Pengadilan Negeri Tembilahan	1.925.000
5	662991	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	3.575.000
6	402016	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	5.570.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau			24.628.000
1	663027	Pengadilan Negeri Menggala	7.150.000
2	99236	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	11.890.000

No.	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Anggaran Perjadin Yang akan Di Self Blocking (Rp.)
3	99052	Pengadilan Negeri Kotabumi	1.000.000
4	477307	Pengadilan Negeri Kota Agung	8.000.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang			28.040.000
1	099090	Pengadilan Tinggi Semarang	6.564.000
2	099115	Pengadilan Negeri Surakarta	3.240.000
3	099108	Pengadilan Negeri Purworejo	1.400.000
4	099094	Pengadilan Negeri Pekalongan	3.870.000
5	099099	Pengadilan Negeri Kendal	1.250.000
6	099102	Pengadilan Negeri Salatiga	8.925.000
7	099112	Pengadilan Negeri Temanggung	1.207.000
8	099105	Pengadilan Negeri Blora	1.000.000
9	099097	Pengadilan Negeri Brebes	1.390.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang			28.846.000
1	099071	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	3.190.000
2	099073	Pengadilan Negeri Ciamis	2.775.000
3	099068	Pengadilan Negeri Bandung	1.130.000
4	400410	Pengadilan Negeri Cibadak	2.042.000
5	099078	Pengadilan Negeri Purwakarta	2.487.000
6	099072	Pengadilan Negeri Garut	3.090.000
7	099069	Pengadilan Negeri Sumedang	1.135.000
8	477293	Pengadilan Negeri Depok	2.520.000
9	099084	Pengadilan Negeri Cianjur	1.225.000
10	099083	Pengadilan Negeri Sukabumi	2.380.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung			21.974.000
1	400023	Pengadilan Tinggi Jayapura	1.840.000
2	400039	Pengadilan Negeri Jayapura	7.160.000
3	400051	Pengadilan Negeri Merauke	4.700.000
4	400091	Pengadilan Negeri Biak	4.620.000
5	400277	Pengadilan Negeri Serui	2.690.000
6	614891	Pengadilan Negeri Kota Timika	1.140.000
Jumlah Total di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura			22.150.000
JUMLAH TOTAL SELF BLOCKING (Rp.)			2.112.891.000

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor : (tanggal, bulan, tahun)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas

Yth. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Otto Iskandardinata No. 53-55 Jakarta

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian Negara/Lembaga TA 2024;
 - c. DIPA Petikan Nomor Tanggal kode *digital stamp*
2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tema Revisi : Revisi Administrasi;
 - b. Tata Cara Revisi : Pencantuman dalam Catatan Halaman IV.A DIPA (blokir).
3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi:
 - a. menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024;
 - b. melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan Halaman IV.A DIPA sebagai penghematan.
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks Semula-Menjadi;
 - b. Konsep DIPA;
 - c. DIPA Petikan revisi terakhir.
 - d. *Dokumen lain yang dipersyaratkan (misalnya persetujuan pejabat eselon I, dst).*
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material usulan revisi anggaran yang diajukan, dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggungjawab kuasa pengguna anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama....
NIP/NRP....



Lampiran 1

FORMAT SURAT PERNYATAAN KPA KOORDINASI DENGAN ESELON I

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Organisasi :

Sehubungan dengan pengajuan revisi DIPA terkait penghematan belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, dengan ini kami menyatakan bahwa Satker sudah berkoordinasi dengan Eselon I terkait besaran jumlah kegiatan perjalanan dinas yang diblokir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP/NRP



JUKNIS SAKTI REVISI DIPA PENGHEMATAN BELANJA PERJALAN DINAS TAHUN 2024

1. Memilih status history Revisi DIPA dengan User Operator Penganggaran
Penganggaran >> Utility >> Memilih Status History
Pilih tombol **Usulan Rev.Dipa**

Pencarian Menu

- Administrasi
- Referensi
- Penganggaran**
- RUH
- ADK
- Monitoring
- Pegawai
- Utility**
- Memilih Status History
- Laporan / Cetak
- Revisi DIPA
- Penelaahan RKAKL
- Komitmen
- Bendahara
- Pembayaran
- Persediaan
- Aset Tetap
- Piutang
- Akuntansi dan Pelaporan
- Laporan

Memilih Status Histori

Revisi Terakhir
DIPA Terakhir

DIPA AWAL 0 - 05/01/24
DIPA AWAL 0 - 05/01/24

Histori Awal DIPA AWAL - Revisi ke 0
Histori Tujuan DIPA AWAL - Revisi ke 0

Revisi Satker (POK) Usulan Rev.Dipa

OK BATAL

Catatan: Revisi Pemutakhiran atau Revisi Halaman III HARUS Menggunakan Usulan Revisi DIPA, BUKAN Menggunakan Revisi Satker (POK)

Version 6 November 2024 06:10:18 GMT+7

2. Pilih tombol **YA**

konfirmasi USULAN DIPA

⚠ apakah anda yakin untuk mengcopy data USULAN DIPA ?

Ya Tidak

3. Memastikan status history Revisi DIPA telah terbentuk
Penganggaran >> Monitoring >> Submit dan Approve Data

Pencarian Menu

- Administrasi
- Referensi
- Penganggaran
- RUH
- ADK
- Monitoring**
- Submit dan Approve Data
- Digital Stamp
- Standar Struktur Biaya
- Pagu Satker
- Revisi DIPA
- Pemutakhiran KPA
- Ansip Data Revisi
- Dokumen DIPA
- Sanding Data PNBPN
- Sanding Data RKBMN
- Pegawai
- Utility
- Laporan / Cetak
- Revisi DIPA
- Penelaahan RKAKL
- Komitmen
- Bendahara

Monitoring Submit dan Approve Data

Tahun Anggaran: 2024
Kementerian: 015
Unit: 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
Diren Perbendaharaan

Tampilkan: Seluruh Data Data Usulan Terakhir Data Usulan Terakhir POK Data Usulan Terakhir DIPA

PAH Kategori Pencarian: Tampilkan Kriteria PIC Ubah Owner Munculkan setelah pilih item

Satker	Owner	Status-History	Sumber	Tgl-Rev	Page	Pendapatan	Valid	CoA	S	U	K	D
126429 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE	SATKER	ACT USULAN DIPA - Rev. Ke 1	800	23-11-2023	1.499.225.000	0						
126429 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NE	SATKER	800 - DIPA AWAL - Rev. Ke 0	800	23-11-2023	1.499.225.000	0						

Simpan Kembali

Version 6 November 2024 06:10:18 GMT+7

4. Melakukan penghematan/self blocking
Penganggaran >> RUH >> Belanja Redesain

5. Memilih detail akun yang akan di blokir dengan memberi tanda "✓" kemudian pilih "Ubah" untuk

melakukan pemblokiran.

6. Pilih blokir dengan memberi tanda "✓" kemudian pilih jenis blokir "A. Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya". Isikan uraian pada catatan berupa "Kebijakan S-1023/MK.02/2024" kemudian isikan nilai yang akan dihemat kemudian pilih tombol "OK".

7. Memastikan detail akun yang telah diblokir akan muncul tanda “*”.

Belanja Redesain

Tahun Anggaran* 2024 USULAN DIPA-1
 K/L - Unit* 015 06 KEMENTERIAN KEUANGAN : DITJEN PERBENDAHARAAN
 Satker* 528409 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO

Jenis User SATKER
 Jenis Role OPERATOR

USULAN DIPA BACKUP

Harap **simpan data** secara berkala untuk menghindari perubahan data hilang saat form tertutup.

Pagu : 3.499.225.000

KODE	URAIAN	VOL	SET	HARGA	JUMLAH	PT	ID	0	1	0
015.00.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko				164.900.000					
4801	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko				8.188.000					
4801.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	0		8.188.000					
4801.FAE.001	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	1	0		8.188.000					
100	Tidak ada komponen				8.188.000					
A	Monev Penyusunan Anggaran Ultra Mikro (0000) - RUCI				8.188.000					
528411	Belanja Pembinaan Dinas Pusat				1.396.000					
528411.001	Belanja Pembinaan Dinas Pusat				1.396.000					
528411.001.01	Transport (1.0 KAB + 2.0 DRG + 3.0 HR) (000001)	1	0	450.000	450.000					
528411.001.02	Akomodasi (1.0 KAB + 2.0 DRG + 3.0 HR) (000002)	1	0	745.000	745.000					
528411.001.03	Kuang Makan (1.0 KAB + 2.0 DRG + 3.0 HR) (000003)	4	0	144.000	1.476.000					
528411.001.04	Belanja Pembinaan Dinas Daerah Kota				1.280.000					
528411.001.04.01	Transport Lokal (1.0 DRG + 2.0 FKK + 3.0 HR) (000004)	6	0	150.000	1.280.000					

8. Memastikan RPD Halaman III DIPA telah disesuaikan

Penganggaran >> RUH >> RPD Bulanan (Hal III)

Pastikan pada kolom “Proses” tidak ada yang berwarna “Merah”. Jika ada yang berwarna merah agar disesuaikan RPD-nya dengan memilih “Renc Penarikan”.

RPD

Tahun 2024 USULAN DIPA - 1
 Dept 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit 06 Ditjen Perbendaharaan
 Kab/Kod 528409 Kantor Daerah
 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO

Kode	Uraian	Jumlah Pagu	Jumlah Rencana	Proses
015.00.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	164.900.000	164.900.000	
4801	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	8.188.000	8.188.000	
4801.1953.00.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	8.188.000	8.188.000	
4801.FAE.001	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	8.188.000	8.188.000	
100	Tidak ada komponen	8.188.000	8.188.000	Renc Penarikan
5212	Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	121.050.000	121.050.000	
5212.1953.00.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	26.764.000	26.764.000	
5212.FAC.001	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi	26.764.000	26.764.000	
100	Tidak Ada Komponen	26.764.000	26.764.000	Renc Penarikan
5212.1953.00.FAH	Pengetahuan Keuangan Negara	35.636.000	35.636.000	
5212.FAH.001	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kepala BLU	35.636.000	35.636.000	
100	Tidak ada komponen	35.636.000	35.636.000	Renc Penarikan
5212.1953.00.FAL	Pengejaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembayaran	58.650.000	58.650.000	
5212.FAL.004	Konsultasi Perencanaan Dana	58.650.000	58.650.000	

9. Kemudian sesuaikan nilainya serta pastikan kolom “Sisa” bernilai “0”.

Rekam POK

Bulan	%	Nilai	Bulan	%	Nilai
Januari	8.32	681.000	Juli	8.32	681.000
Februari	8.32	681.000	Agustus	8.32	681.000
Maret	8.32	681.000	September	8.32	681.000
April	8.32	681.000	Oktober	8.32	681.000
Mei	8.32	681.000	November	8.32	681.000
Juni	8.32	681.000	Desember	8.51	697.000

Pagu yang tidak dapat ditarik 376.000

Sisa 0

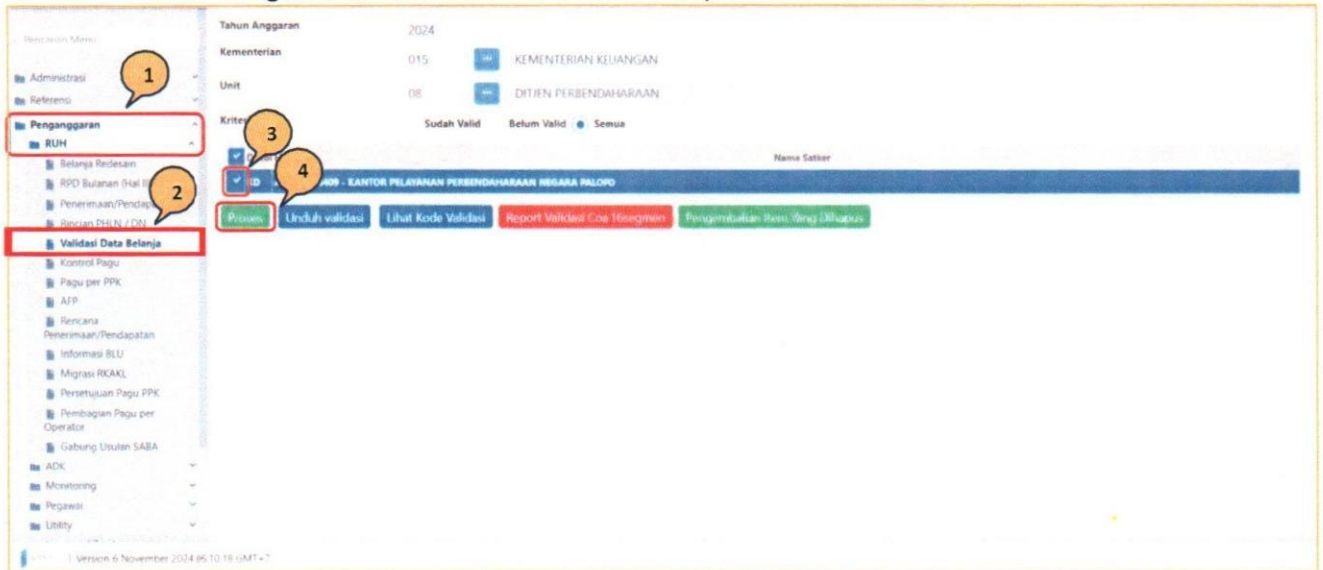
Total 8.188.000

Simpan Tutup

10. Melakukan Validasi Data Belanja

Penganggaran >> RUH >> Validasi Data Belanja

Pilih kode satker dengan memberi tanda "✓" kemudian pilih tombol **Proses**.



11. Jika data valid maka akan muncul "Data Valid".

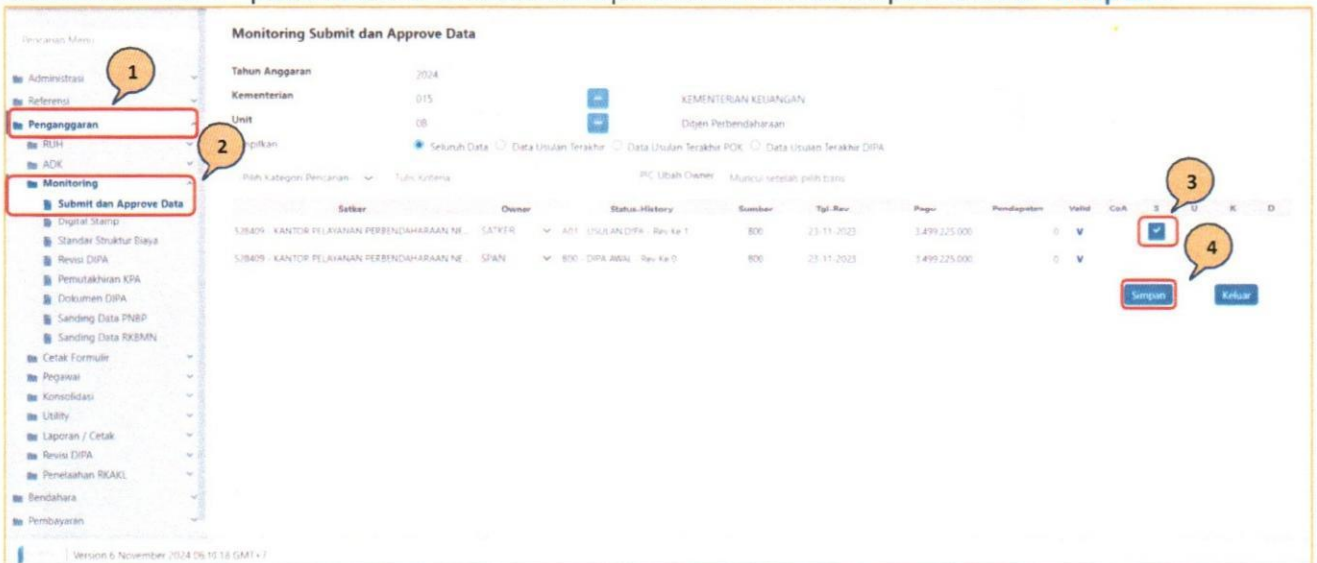
Jika data tidak valid maka akan muncul berwarna "Merah" kemudian pilih tombol "Unduh Validasi" dan liat kode validasinya kemudian pilih tombol "Lihat Kode Validasi" untuk mengetahui data yang tidak validnya.



12. Melakukan persetujuan Revisi DIPA oleh KPA dengan User Approver Penganggaran

Penganggaran >> Monitoring >> Submit dan Approve Data

Memberi tanda "✓" pada kolom **S** untuk revisi dipa terakhir kemudian pilih tombol "Simpan".



13. Pilih Menu “Pengajuan Revisi”, Isi Kolom Isian
Pilih Kewenangan “Kanwil DJPB”

Pengajuan Revisi

ID REVISI 2024 506081 002

Tahun Anggaran 2024 KL/Unit 015 09 KEMENTERIAN KEUANGAN / DIJEN KEKAYAAN NEGARA

Nomor Surat* 123 Tanggal Surat* Kamis, 07 November 2024

Hal* revisi blokir perjadi

Pejabat Yang Mengajukan* pejabat Jabatan* jabatan NIP* 123456

Nama Pejabat (KPA) USER TRAINING - 0150950608 Email Penerima OTP 0150950608100002@kemenkeu No HP Penerima OTP 08765060812

Kewenangan* DJA PA DJPB **Kanwil DJPB** Pemutakhiran KPA KL

Jenis Revisi yang dipilih adalah Revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya (kode 239).

14. Validasi Manual di Pilih “Ya” Isi Kolom Catatan
Upload Dokumen Catatan kemudian Klik Tombol “Lanjut”.

Dokumen

Surat Usulan Revisi*
Tipe File: pdf, rar, zip Max: 100 MB. File akan di rename dengan format suratUsulanRevisi-[kode unit/satker]-revisi id,[ekstensi file]!
suratUsulanRevisi-506081-2024 506081 002.pdf
Dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Tata Cara Revisi Anggaran
Dokumen Pendukung Terkait Lainnya
Tipe File: pdf, rar, zip Max: 100 MB. File akan di rename dengan format dokumenDukungLainnya-[kode unit/satker]-revisi id,[ekstensi file]!

Validasi Manual? **Ya** Tidak

Catatan* Catatan

Dokumen Catatan* Tipe File: pdf, rar, zip Max: 100 MB. File akan di rename dengan format dokumenCatatan-[kode unit/satker]-revisi id,[ekstensi file]!

+ Pilih

Pencarian Lokasi

Satker, Dekon Nama Satker History

015 09 506081 2 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN (AD1) USULAN_OTRA_REVISI: 1

+ Satker

Detail Pengajuan Lanjut

15. Ketika pindah ke step validasi akan terkena validasi PMK.
Informasikan Ke Kanwil DJPB untuk melakukan Validasi Secara Manual.
Setelah di lakukan validasi oleh Kanwil DJPB klik “Lanjut”

Pengajuan Revisi

ID REVISI 2024 506081 002

Tahun Anggaran 2024 KL/Unit 015 09 KEMENTERIAN KEUANGAN / DIJEN KEKAYAAN NEGARA

Nomor Surat* 123 Tanggal Surat* Kamis, 07 November 2024

Hal* revisi blokir perjadi

Validasi Kewenangan Revisi (PMK)

GAKUR! Blokiran infokan baru di-rak... atau untuk PRG-0 tidak terbagi cut

Detail Pengajuan Lanjut

16. Klik tombol Pengajuan Revisi, akan muncul Tahapan Verifikasi dengan mengisi OTP

Pengajuan Revisi

ID REVISI 2024 506081 002

Tahun Anggaran 2024 KL/Unit 015 09 KEMENTERIAN KEUANGAN / DIJEN KEKAYAAN NEGARA

Nomor Surat* 123 Tanggal Surat* Kamis, 07 November 2024

Hal* revisi blokir perjadi

Penerima OTP Telp: 08765060812 Email: 0150950608100002@kemenkeu.go.id

Permintaan OTP **Kirim Permintaan OTP**

Kode OTP

Verifikasi OTP **Proses Verifikasi OTP** Silahkan request OTP terlebih dahulu!

Detail Pengajuan Lanjut

Setelah Proses OTP, klik “Lanjut” . Dan Pengajuan Revisi berhasil masuk ke Kanwil DJPB.

Petunjuk Teknis Pengajuan Revisi Kewenangan Kanwil DJPB Melalui Mekanisme “Validasi Manual” Pada Aplikasi Sakti Modul Penganggaran

User Satker

Pilih Menu Pengajuan Revisi,
Isi Kolom Isian
Pilih Kewenangan Kanwil DJPB,

Pengajuan Revisi

1 2 3 ID REVISI 2024.506081.002

Tahun Anggaran	2024	KL/Unit	015	09	KEMENTERIAN KEUANGAN / DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Nomor Surat*	123	Tanggal Surat*	Kamis, 07 November 2024		
Hal*	revisi blokir perjadi				
Pejabat Yang Mengajukan*	pejabat	Jabatan*	jabatan	NIP*	123456
Nama Pejabat (KPA)*	USER TRAINING - 0150950608				
Email Penerima OTP	0150950608100002@kemendik				
Kewenangan*	DIA	PA DJPB	<input checked="" type="radio"/> Kanwil DJPB	Pemutakhiran KPA	KI

Validasi Manual di Pilih “Ya”

Isi Kolom Catatan

Upload Dokumen Catatan

Dokumen Surat Usulan Revisi*

Type File: pdf, rar, zip Max: 100 MB. File akan di rename dengan format suratUsulanRevisi-[kode unit/satker]-revisi id.[ekstensi file]!

suratUsulanRevisi-506081-2024.506081.002.pdf

Dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Tata Cara Revisi Anggaran

Type File: pdf, rar, zip Max: 100 MB. File akan di rename dengan format dokumenDukungEs1-[kode unit/satker]-revisi id.[ekstensi file]!

Dokumen Pendukung Terkait Lainnya

Type File: pdf, rar, zip Max: 100 MB. File akan di rename dengan format dokumenDukungLainnya-[kode unit/satker]-revisi id.[ekstensi file]!

Validasi Manual? Ya Tidak

Catatan* Catatan

Dokumen Catatan* Type File: pdf, rar, zip Max: 100 MB. File akan di rename dengan format dokumenCatatan-[kode unit/satker]-revisi id.[ekstensi file]!

Pencarian	Lokasi	History	Hapus
Satker, Dekon	Nama Satker		
015 09 506081.2	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN	(A01) USULAN_DINA_REVISI 1	<input type="button" value="Hapus"/>
<input type="button" value="+ Satker"/>		<input type="button" value="Batal Pengajuan"/>	<input type="button" value="Lanjut"/>

Klik Tombol Lanjut

Ketika pindah ke step validasi akan terkena validasi PMK

Pengajuan Revisi

1 2 3 ID REVISI 2024.506081.002

Tahun Anggaran	2024	KL/Unit	015	09	KEMENTERIAN KEUANGAN / DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Nomor Surat*	123	Tanggal Surat*	Kamis, 07 November 2024		
Hal*	revisi blokir perjadi				

Validasi Kewenangan Revisi (PMK) GALATI! Ringkasan validasi file di re atau untuk INFO lebih lengkap cek

Informasikan Ke Kanwil untuk melakukan Validasi Secara Manual

Setelah di lakukan validasi oleh kanwil

Klik tombol Pengajuan Revisi, akan muncul Tahapan Verifikasi dengan mengisi OTP

Pengajuan Revisi

1 2 **3**

ID REVISI: 2024.506081.002

Tahun Anggaran	2024	KL/Unit	015 09	KEMENTERIAN KEUANGAN / DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Nomor Surat*	123	Tanggal Surat*	Kamis, 07 November 2024	
Hal*	revisi blokir perjadiin			

Penerima OTP: Telp: 08765060812 Email: 0150950608100002@kemenkeu.go.id

Permintaan OTP: [Kirim Permintaan OTP](#)

Kode OTP:

Verifikasi OTP: [Proses Verifikasi OTP](#) Silahkan request OTP terlebih dahulu!

[Batal Pengajuan](#) [Lanjut](#)

Setelah Proses OTP, klik Lanjut . Dan Pengajuan Revisi berhasil masuk ke Kanwil.

Petunjuk Teknis Proses “Validasi Manual” Oleh Kanwil DJPB Pada Aplikasi Sakti Modul Penganggaran

Tata cara Melakukan validasi manual (User Front Office Kanwil)

Klik Menu Revisi – Monitoring Revisi

Pilih id revisi yang akan di validasi

The screenshot shows the 'Monitoring Revisi' interface. The main content area displays a table with the following columns: ID Revisi, Tahap POK, Tahap 1 (Pencapaian), Tahap 2 (Pencapaian), Tahap 3 (Pencapaian), Tahap 4 (Pencapaian), and Tahap 5 (Pencapaian). A row is highlighted with the ID '2024.506081.002'. Below the table, there is a section for 'Revisi ID : 2024.506081.002 [Revisi : KANWIL MEDAN] 1514043' with details such as 'Jenis Revisi', 'Masa Berlaku', 'Status', 'Tanggal Mulai', 'Tanggal Akhir', and 'Dibuat Oleh'. A red button labeled 'Dinyatakan Valid' is visible at the bottom of the details section.

Melakukan verifikasi kesesuaian Usulan revisi, bisa menggunakan Fasilitas **Mon Matriks**, **Mon DS**, **Mon POK**

Klik Tombol Dinyatakan Valid Jika Sesuai.